



















masa kemerdekaan terlibat secara substantif di kancah politik praktis. Selain menghasilkan keputusan yang menyatakan NU kembali ke Khittah 1926, pada muktamar tersebut juga memunculkan generasi baru yang usianya tergolong muda untuk memimpin NU di tingkat Tanfidziyah.

Pada muktamar Situbindo keluar nama Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum PBNU menggantikan Idham Kholid yang sudah 32 tahun memimpin PBNU yang waktu itu usia Abdurrahman Wahid masih tergolong muda yakni 43 tahun. Selain Abdurrahman Wahid banyak tokoh NU muda yang masuk dalam struktur kepengurusan NU seperti nama Mahbub Djunaid, Fahmi D. Saifuddin, Rozi Munir, Cholid Mawardi, Ghafar Rahman dan pengurus lainnya.

Pada dekade 1980-an kelompok muda pembaharu NU semakin memperoleh tempat di dalam masyarakat NU. Setidaknya ada dua fenomena penting dalam perembangan gerakan pembaharuan itu di era 1980-an yang menjadikan mereka semakin memperoleh tempat baik di dalam NU sendiri maupun di luar.

Pertama, di dalam NU sendiri boleh dikatakan sebagai awal dari kemenangan kelompok progresif ini, yang ditandai dengan tampil atau terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU melalui muktamar situbondo tahun 1984, dengan KH. Ahmad Siddiq sebagai Rais Aam-nya. Kedua figur itu sekaligus mengekspresikan bersandingnya generasi muda NU dengan kyai tua yang disegani, yang secara relatif satu pemikiran dalam kaitan dengan upaya-upaya perubahan yang dikehendaki. Adapun yang terpenting dalam momentum itu adalah diterimanya gagasan-gagasan utama untuk mengembalikan NU ke garis perjuangannya semula, yang kemudian dikenal dengan istilah kembali ke Khittah











Abdurrahman Wahid dan H.M. Anwar Nuris, 16 April 1987. Yang berisikan tujuh hal penting:

1. Seluruh warga NU, baik aktivis/fungsionaris maupun anggota biasa/simpatisan dimanapun berada dilarang/Haram mencoblos gambar Bintang/PPP pada pemilu 23 April 1987 nanti.
2. Seluruh warga NU tersebut tadi dilarang/Haram menjadi Golput.
3. Diperintahkan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada salah satu dari Golkar atau PDI dengan landasan *akhlakulkarimah*.
4. Agar pengurus *Jamiyah* Nahdlatul Ulama disegala tingkatan meningkatkan kerja sama dengan aparat pemerintah dan pelaksana Pemilu, terutama dalam rangka mengadakan pendataan terhadap aktivis/fungsionaris serta warga NU yang selama masa kampanye aktif mendukung PPP, baik tenaga, harta maupun dalam wujud tingkah laku, lebih lagi yang bersifat memfitnah dan mendikreditkan ulama dan *jamiyah* itu sendiri
5. Agar para *AlimUlama* menggerakkan dan meningkatkan gerakan batin, baik dalam sholat hajat, istighosah maupun pembacaan hizib dan doa. Bukan saja untuk meningkatkan *taqarub* kita kepada Allah SWT, tetapi lebih dari itu gerakan inti Ulama yang terselubungkan PPP segera mendapatkan penyelesaian dari Allah AWT sesuai dengan upayanya selama ini.
6. Agar pengajian-majlis taklim dan kegiatan keagamaan yang diseleenggarakan- dilakukan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama setelah Pemilu





